

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia, yang pada saat ini hampir memasuki usia ke 58 tahun kemerdekaannya, bukanlah Indonesia yang semakin matang yang dijumpai, melainkan terjadi ancaman disintegrasi dan tindakan-tindakan anarkhis lainnya. Disintegrasi yang terjadi tidak terbatas pada tataran bangsa dan wilayah, namun juga terjadi pada tataran elite massa, nilai dan perilaku. Bangsa dan wilayah terancam pecah, sementara elite yang makin sering terlihat mengadakan manuver politik semakin tidak dipahami oleh rakyat. Demikian halnya jarang atau jika boleh dikatakan tidak pernah elite politik mampu mengungkapkan nilai-nilai kepahlawanan, apalagi upaya untuk merekat kembali ikatan kebangsaan.

Merenggangnya persatuan biasanya dihubungkan dengan melemahnya nasionalisme. Ketika tokoh-tokoh Generasi 1945 masih hidup, mereka sangat khawatir akan nasionalisme anak muda yang memudar. Anak muda sekarang, menurut mereka, tidak senasionalis pemuda-pemuda semasa mereka, yang mati-matian membela bangsa. Bagi para pejuang ini, nasionalisme yang sesungguhnya adalah nasionalisme yang rela berkorban seperti jaman revolusi, walaupun demikian kekhawatiran Angkatan 1945 terlihat tidak *fair* karena situasinya berbeda.

Jika kita membandingkan nasionalisme yang lahir pada jaman pergerakan nasional dengan nasionalisme yang muncul pada saat ini, nampak perbedaan yang cukup mendasar, meskipun terdapat persamaan. **Persamaan** yang dapat dilihat ada-

lah nasionalisme pada jaman pergerakan nasional lebih bersifat global dan nasionalisme sekarang lebih bersifat lokal, lahir dan muncul sebagai suatu bentuk respon akan kesadaran ketidakadilan, merasa terjajah, tertinggal dan cinta tanah air.

Sedangkan **perbedaannya** adalah munculnya nasionalisme pada jaman pergerakan nasional lebih disebabkan adanya perasaan ketinggalan, kebodohan, tertindas, dan kemiskinan sebagai akibat dari kolonialisme. Sedangkan nasionalisme akhir-akhir ini lebih disebabkan oleh munculnya perasaan ketimpangan pembangunan daerah dan pusat, alokasi dana yang tidak seimbang, adanya perasaan dieksploitasi oleh pemerintah pusat (sehingga melahirkan Otonomi Daerah). Namun perbedaan yang paling mendasar dari keduanya adalah bahwa nasionalisme yang lahir pada jaman pergerakan nasional lebih bersifat sebagai perekat untuk mempertahankan keutuhan bangsa (*integrative*), sedangkan nasionalisme saat ini lebih bersifat mengancam keutuhan dan persatuan bangsa (*disintegrasi*) seperti yang telah dipaparkan di atas.

Terjadinya disintegrasi di negara kita antara lain disebabkan oleh kondisi Indonesia yang merupakan negara majemuk dan heterogen, karena terdiri atas berbagai macam suku bangsa, agama dan keyakinan dengan berbagai macam kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan. Namun keanekaragaman atau kemajemukan tersebut apabila dikelola dengan baik dapat menjadi kekuatan dan kekayaan. Oleh karena itu kehidupan sebagai bangsa dengan keanekaragaman itu akan memberikan warna-warni dalam budayanya, memberikan kesempatan untuk mengekspresikan berbagai kemampuan yang hasilnya dapat saling memperkaya, dan puncak-puncak kemampuannya akan memberi makna yang tidak sedikit bagi perkembangan dan kemajuan Indonesia.

Dapat dikatakan bahwa *core value* nasionalisme saat ini (baru) adalah terpenuhinya rasa keadilan, meratanya kesejahteraan, terpenuhinya ketentraman dan keamanan, penghargaan terhadap keberagaman. Muatan ini harus dikelola dengan sebaik mungkin agar makna Indonesia kembali mempunyai kekuatan di hati rakyat di seluruh daerah kawasan nusantara.

Berkaitan dengan Globalisasi yang semakin menggejala, menimbulkan konsekuensi bagi setiap negara, termasuk Indonesia, karena negara secara internasional dihadapkan pada masalah loyalitas warganegaranya, yakni antara individu yang berorientasi ke arah keterikatan global dan individu yang bergerak ke arah penguatan subnasional. Dengan kata lain globalisasi menumbuhkan kesadaran bahwa kita merupakan warga dari suatu kampung dunia yang tidak memerlukan jati diri bangsa, di pihak lain makin tumbuh pula dorongan untuk lebih melestarikan dan memperkuat jati diri / identitas kebangsaan. Dalam kaitan ini tentu saja setiap negara akan mempertahankan jati diri bangsanya untuk kelangsungan keberadaan/ eksistensi negaranya.

Namun demikian, dewasa ini globalisasi telah memukul-mukul pagar nasionalisme dan pagar kedaulatan nasional. Demikian halnya kemajuan dan perkembangan teknologi media-massa membuat dunia makin kecil dan makin memperat hubungan serta kerjasama global dan regional. Interaksi kerjasama global dan regional di bidang politik, militer dan ekonomi-keuangan sedang menggusur dan menggeser arti kedaulatan nasional, sehingga cenderung menjadi usang. Perikat kedaulatan nasional, yaitu nasionalisme cenderung mengalami proses pencairan dan pelongsoran.

Kondisi nasionalisme seperti yang telah dikemukakan di atas, juga melanda Jawa Barat, sebagai salah satu propinsi di Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan dengan adanya peristiwa-peristiwa sebagai berikut :

- Lepasnya Banten menjadi propinsi yang berdiri sendiri, yang pada awalnya diwarnai pro dan kontra dari masyarakat Sunda. Hal ini merupakan bukti terjadinya disintegrasi (positif) bagi masyarakat yang pro, dan disintegrasi (negatif) dari masyarakat yang kontra. Walaupun sebenarnya masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak seperti Timor-Timur yang sudah lepas dari Indonesia, dan Aceh serta Irian Jaya yang menginginkan keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) cabang Cianjur (Jawa Barat), diserbu puluhan massa. Benderanya dibakar, sejumlah barang inventaris dijarah, surat-surat dan dokumen penting milik partai juga di bawa lari. Lebih jauh ketuanya dicoba akan di bunuh di tengah jalan dengan cara memukul mobilnya. Sehari setelah peristiwa tersebut, segerombolan massa dengan membawa beberapa kendaraan umum dan truk menyerbu kembali Kantor PDI-P. Hal ini terjadi karena keinginan kelompok massa yang akan mempertahankan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden.
- Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, diserang puluhan ribu amuk massa. Hampir seluruh bagian bangunan itu tampak hancur, pintu, jendela ruang-ruang kantor rakyat itu ditambal dengan tripleks. Berbagai arsip penting, beberapa perangkat komputer dan kendaraan operasional Dewan hancur. Aksi tersebut sangat brutal, bukan saja berteriak dan mengancam, namun disepanjang jalan yang dilewati, mereka melempar apa saja yang terlihat. Inilah gaya

aksi buruh tanah Sunda menyalurkan aspirasinya dalam menolak terbitnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) No 78 dan No 111 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Beberapa Pasal Kepmenaker No 150 Tahun 2000, yang mengatur soal penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti rugi di perusahaan.

Peristiwa-peristiwa di Jawa Barat yang dikemukakan di atas, menurut penulis sebenarnya tidak perlu terjadi. Seperti masyarakat Banten, apabila memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) yang kuat sebenarnya tidak perlu memisahkan diri dari Jawa Barat. Apabila alasannya ingin mengembangkan potensi daerah Banten secara mandiri toh dapat dilakukan dengan otonomi daerah, namun masih dalam wilayah Propinsi Jawa Barat. Demikian halnya dengan peristiwa Cianjur dan gedung DPRD Jawa Barat, apabila mereka (pelaku amuk massa) memiliki rasa nasionalisme yang kuat, maka tindakan mereka dapat dilakukan dengan tertib tanpa terjadi pengrusakan dan kekerasan lainnya. Dilain pihak tindakan brutal mereka, jika ditinjau dari sosio-kultural masyarakat Sunda yang dikenal lemah lembut sangat tidak sesuai.

Peristiwa amuk massa yang terjadi di gedung DPRD Jawa Barat mengimbas ke Bandung sebagai ibukota propinsi dimana gedung DPRD berada. Pada saat itu secara tiba-tiba dan bersamaan berbagai sudut Kota Bandung dilanda gelombang gerakan anarkistis yang menyusup ke segala arah, baik timur, barat, selatan maupun utara Kota Bandung. Sebagian besar pemilik toko tutup, seluruh warga Kota Bandung memilih untuk diam di rumah dan tidak menjalankan aktivitasnya. Termasuk pula sekolah-sekolah memutuskan untuk meliburkan siswanya.

Demikian halnya dengan masyarakat pecinta olah raga, khususnya sepak bola. Sebagai contoh setelah menyaksikan pertandingan PERSIB dengan lawannya, yang berakhir dengan kekalahan PERSIB, para pendukung (*bobotoh*) merasa kecewa dan melampiaskannya dengan melempari kaca-kaca bangunan, merusak pot-pot bunga, dan melempari mobil yang mereka temui disepanjang jalan yang mereka lalui. Padahal dalam dunia olah raga sangat dibutuhkan sportivitas baik pemain maupun para pendukung (*bobotoh*).

Hal lainnya, adanya genk bermotor yang sangat meresahkan masyarakat Kota Bandung. Gank tersebut sering melakukan tindakan brutal, seperti bertindak sewenang-wenang menganiaya masyarakat yang ditemui dengan memukul tanpa sebab, melempari mobil yang mereka temui dan sebagainya.

Berkaitan dengan sekolah, beberapa peristiwa menggambarkan kurang adanya rasa kebangsaan (*nasionalisme*) siswa, seperti terjadinya tawuran/ perkelahian antar pelajar beberapa sekolah baik di tingkat SMU maupun SLTP. Mereka menggunakan berbagai senjata tajam dalam aksi tawurannya. Peristiwa itu mengakibatkan beberapa orang luka-luka, guru yang terkena bacokan, masuknya beberapa orang ke lembaga pemasyarakatan, dan seorang meninggal dunia.

Peristiwa tawuran/ perkelahian antar pelajar tersebut, tentu saja menimbulkan keresahan masyarakat khususnya orang tua yang putra-putrinya berada di tingkat SMU/ SLTP; sehingga sebagian orang tua melarang putra-putrinya ke sekolah sampai meredanya tawuran. Bahkan sekolah yang siswanya ikut tawuran diliburkan beberapa hari.

Selain terjadinya tawuran, pemakaian obat-obatan terlarang dan minuman keras yang dilakukan pelajar di Kota Bandung juga marak. Hal ini dapat dibuktikan

dengan ditangkapnya beberapa pengedar maupun pemakai obat-obatan dan minuman keras adalah pelajar. Bahkan di daerah sekitar Bandung terjadi pemerkosaan yang dilakukan beberapa siswa setelah mereka minum minuman keras.

Peristiwa-peristiwa di Kota Bandung yang telah dipaparkan di atas, jelas bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme. Karena hal itu dapat mengakibatkan bentrokan dan tindakan yang semakin meluas dan parah, yang dapat memecah persatuan. Khusus untuk pelajar apabila hal ini tidak ditangani secara serius dengan melibatkan berbagai pihak, maka dampaknya akan lebih buruk. Karena pelajar adalah pewaris bangsa yang memegang estafet kepemimpinan. Pelajar adalah pemuda-pemudi yang diharapkan melanjutkan perjuangan dan menjaga eksistensi bangsa dan negara Indonesia.

Rasa kebangsaan (nasionalisme) harus tetap ditanamkan dan dibina kepada seluruh warganegara Indonesia tanpa kecuali. Andaikata rasa kebangsaan itu tidak secara terus menerus ditanamkan dan dibina, maka akan mati, bangsa Indonesia akan mati dan negara-pun hancur. Karena yang mempersatukan ratusan etnik, suku, komunitas, budaya, dan penganut beberapa agama/ kepercayaan yang hidup di atas ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke, hanyalah kebangsaan Indonesia. Tak ada yang dapat menggantikan rasa kebangsaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa terdapat keterkaitan antara nasionalisme, bangsa / negara, dan kewarganegaraan (*citizenship*). Dalam pengertian ini, nasionalisme dipahami sebagai bagian dari persoalan pengembangan hak dan kewajiban warganegara, yakni menggalakkan partisipasi sosial dalam suatu komunitas tertentu sebagai anggota masyarakat yang sah dan legal. Disamping itu keterkaitan antara nasionalisme, kewarganegaraan dan bangsa selalu terjalin, karena

masyarakat sebagai warganegara yang sah dari suatu bangsa hanya dapat eksis dan *survive* jika mereka mampu membangun dan menjaga keutuhan bangsanya.

Kesadaran, sentimen, dan nasionalisme kebangsaan tidak dapat dikembangkan secara subjektif dari individu atau kelompok tertentu, namun harus dikembangkan secara struktural, yaitu melalui kebijakan politik dan strategi politik. Dalam hal ini sangat terkait dengan kekuasaan, karena politik selalu terkait dengan kekuasaan, dan kekuasaan berkaitan dengan pengendalian negara yang biasanya dilakukan oleh pemerintah (yang berkuasa).

Pembinaan kesadaran, sentimen, dan nasionalisme kebangsaan tersebut sangat penting dilakukan kepada generasi muda sebagai penerus yang akan mempertahankan eksistensi bangsa seperti yang telah dikemukakan di atas. Pembinaan ini telah diupayakan oleh pemerintah melalui jalur pendidikan yang diatur oleh Departemen Pendidikan Nasional, khususnya melalui mata pelajaran Sejarah dan PPKn dari TK sampai SLTA. Namun walaupun telah dibelajarkan, belum menampakkan hasil yang optimal. Hal ini dapat dilihat dengan adanya fenomena sering terjadi tawuran antar pelajar, pemakaian obat-obatan terlarang, tindakan anarkhis yang dilakukan pelajar, dan sebagainya seperti yang telah dipaparkan di atas.

SMU Negeri 8 Bandung, adalah salah satu sekolah menengah yang berada di wilayah Kota Bandung. Kondisi tenaga pendidik (guru) dan karyawan serta siswanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia, walaupun tidak dapat dipungkiri sebagian besar berasal dari masyarakat Sunda. Komunikasi antara satu dengan yang lainnya berjalan secara harmonis tanpa membedakan daerah/ suku. Dalam rangka mewujudkan rasa kebangsaan (nasionalisme) dilakukan antara lain dengan memperingati hari besar nasional melalui upacara, khusus untuk memperingati Hari Kemerdekaan

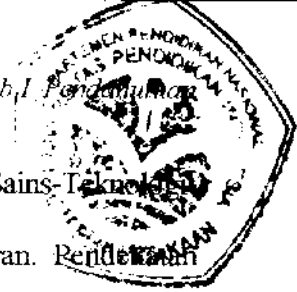


Republik Indonesia, selain diadakan upacara juga dilakukan kegiatan-kegiatan lainnya seperti perlombaan olah raga, kesenian, sampai pada perlombaan yang bersifat permainan. Dalam rangka memperingati hari besar agama-pun diadakan berbagai acara yang bermuansa religius, seperti perlombaan adzan, mengaji (Qiro'), khotbah (pidato) dan sebagainya.

Berkaitan dengan kondisi pelajar Kota Bandung yakni adanya tawuran antar pelajar, dan pemakaian obat-obat terlarang serta minuman keras, pada kenyataannya siswa SMU Negeri 8 Bandung tidak terlibat. Namun sebagai antisipasi dari adanya peristiwa-peristiwa yang telah diuraikan di atas, SMU Negeri 8 Bandung sebagai salah satu institusi pendidikan harus dapat mengarahkan dan membina siswanya agar tidak terpengaruh perilaku / tindakan yang telah dilakukan sebagian pelajar di Kota Bandung. Salah satu usaha yang dilakukan adalah melalui strategi pembelajaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai salah satu mata pelajaran yang antara lain mempelajari dan mengkaji tentang hak dan kewajiban sebagai warganegara, nasionalisme, sistem pemerintahan, dan nilai-nilai kepahlawanan yang perlu dijadikan panutan dan berperan menggariskan komitmen untuk melakukan proses pembangunan karakter bangsa (*national and character building*), tentunya senantiasa tanggap dan membenahi diri agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan (sains) dan teknologi dalam era globalisasi. Dengan kata lain dalam mengantisipasi kemajuan sains dan teknologi perlu dilakukan berbagai pembaharuan dan perbaikan dalam dunia pendidikan pada umumnya dan PPKn pada khususnya.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam mengantisipasi kemajuan sains dan teknologi beserta dampaknya yang berkaitan dengan pendidikan, dalam hal



ini PPKn adalah dengan menerapkan program/pendekatan Sains-Teknologi Masyarakat (*Science-Technology-Society*) dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan antara kemajuan sains dan teknologi, membanjirnya informasi ilmiah dalam dunia pendidikan, masuknya budaya asing, dan informasi lainnya yang ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, yang dimungkinkan dapat mengikis nasionalisme.

Perkembangan sains dan teknologi seringkali menimbulkan dampak dalam proses perubahan masyarakat. Hal ini seperti digambarkan Margaret Mead seorang Antropolog, dalam bukunya yang berjudul "Cultural Patterns and Technical Change". Mead melakukan analisis terhadap perubahan dalam masyarakat yang diakibatkan oleh masuknya pengaruh asing berupa teknologi. Masuknya teknologi dalam masyarakat ternyata tidak hanya dapat mengubah kondisi kehidupan masyarakat, tetapi juga dapat mengubah cara hidup manusia dalam masyarakat itu (Mead, 1962 : 288).

Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis terpanggil untuk mengkaji apakah Pendekatan S-T-M dalam pembelajaran PPKn mampu meredam eksek negatif perkembangan sains dan teknologi yang dapat mengikis sikap nasionalisme generasi muda Indonesia dan sebaliknya akan menumbuhkan sikap tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian diharapkan dengan adanya pengkajian ini dapat memberikan kontribusi untuk mengatasi dan lebih jauh dapat mengantisipasi agar perkembangan sains dan teknologi tidak mengakibatkan jati diri bangsa akan luntur dan memudar, terutama terkikisnya sikap nasionalisme generasi muda.

## B. RUMUSAN MASALAH DAN FOKUS PENELITIAN

### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : Apakah pendekatan Sains-Teknologi-Masyarakat (S-T-M) dalam pembelajaran PPKn pada pokok bahasan “Kesetiaan” mampu mengembangkan sikap nasionalisme siswa.

### 2. Fokus Masalah Penelitian

Agar masalah penelitian ini terfokus, berikut dirumuskan fokus-fokus masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian.

- a. Bagaimana siswa menyikapi proses pembelajaran PPKn dengan pendekatan S-T-M ?
- b. Apakah proses pembelajaran yang berlangsung mampu mengembangkan kreatifitas siswa dalam menyelesaikan tugas baik di kelas (kegiatan intrakurikuler) maupun di luar kelas (kegiatan ekstrakurikuler) ?
- c. Apakah proses pembelajaran yang berlangsung itu berpengaruh terhadap pemahaman para siswa terhadap konsep nasionalisme ?
- d. Apakah proses pembelajaran yang berlangsung itu mampu mengembangkan sikap loyalitas nasionalisme para siswa ?
- e. Adakah hubungan positif antara penguasaan konsep nasionalisme dengan pengembangan sikap loyalitas nasionalisme para siswa ?

### C. IDENTIFIKASI, PENAMAAN, DAN DEFINISI OPERASIONAL PENELITIAN

#### 1. Identifikasi Variabel

- Metode pembelajaran PPKn melalui Pendekatan S-T-M
- Sikap Nasionalisme Siswa

#### 2. Penamaan dan Defenisi Operasional Variabel

NO	VARIABEL	DEVINISI OPERASIONAL
1	Variabel bebas : Metode Pembelajaran PPKn melalui Pendekatan S-T-M	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metode adalah jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan.</li> <li>▪ Pembelajaran PPKn adalah suatu proses belajar-mengajar dalam mata pelajaran PPKn</li> <li>▪ Pendekatan S-T-M adalah kegiatan pembelajaran mengenai sains dan teknologi dalam konteks pengalaman manusia dalam kehidupannya sehari-hari sebagai anggota masyarakat.</li> </ul>
2	Variabel terikat : Sikap Nasionalisme Siswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sikap adalah respon terhadap obyek tertentu yang menimbulkan kecenderungan untuk melakukan sesuatu perbuatan. Sikap itu meliputi sikap terhadap : pokok bahasan Kesetiaan (nasionalisme) dan pendekatan S-T-M dalam pembelajaran PPKn.</li> </ul>

Untuk memperjelas definisi operasional, dibuat rancangan pembelajaran dengan pendekatan S-T-M sebagaimana terlampir (lihat lampiran 1.1.)

## D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

### 1. Tujuan Penelitian

#### 1.1. Tujuan umum :

- 1.1.1. Melakukan sosialisasi Pendekatan S-T-M kepada guru-guru PPKn (IPS) sebagai salah satu pendekatan alternatif yang dapat meningkatkan pengembangan kreatifitas, konsep, dan sikap siswa dalam rangka inovasi pembelajaran.
- 1.1.2. Agar siswa SMU Negeri 8 Bandung memiliki literasi (melek) terhadap perkembangan pelajaran PPKn, teknologi, dan kehidupan masyarakat, sehingga siswa mempunyai kemampuan untuk mengambil suatu keputusan yang tepat dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

#### 1.2. Tujuan khusus :

- 1.2.1. Mendapatkan informasi tentang sikap siswa terhadap pendekatan S-T-M dalam pembelajaran PPKn sebagai salah satu pendekatan untuk meningkatkan kreatifitas, memantapkan penguasaan konsep dan pengembangan sikap.
- 1.2.2. Mengukur kehandalan pendekatan S-T-M sebagai sebuah pendekatan dalam pembelajaran PPKn yang mengupayakan peningkatan kreatifitas, penguasaan konsep, dan pengembangan sikap loyalitas nasionalisme para siswa melalui pokok bahasan "Kesetiaan".

- 1.2.3. Mendapatkan informasi tentang hubungan antara penguasaan konsep nasionalisme dengan pengembangan sikap loyalitas nasionalisme para siswa.

## 2. Kegunaan Penelitian

- 2.1. Secara teoritis, hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan/ memperkaya pendekatan / model pembelajaran PPKn (IPS), khususnya model-model pembelajaran yang inovatif.
- 2.2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman pembelajaran bagi guru mata pelajaran PPKn (IPS) di SMU, dan sebagai referensi oleh praktisi pendidikan dalam menentukan kebijaksanaan selanjutnya menyangkut pembelajaran PPKn (IPS).

## E. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

### 1. Gagasan Dasar Penelitian

Betapa pentingnya rasa nasionalisme itu dimiliki oleh setiap individu dalam sebuah negara-bangsa. sehingga Abdul Moeis dalam buku *Permata Terbenam*, menyatakan “ *Selama Bumiputera tanah Hindia belum mempunyai kebangsaan dan tanah air sejati, maka perasaan cinta pada tanah air dan bangsa itu harus dibangun dalam kalbu bumiputera itu. Sebab suatu bangsa yang tidak mempunyai perasaan itu tidak akan maju, malah mundur. jika ia kurang-kurang teguh berdiri pada batu tapakannya* “. (Soeharto, Pitut dan Ihsan Zainoel, 1981 : 79).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pendidikan (sekolah) yang merupakan tempat pembinaan nasionalisme bagi pelajar sebagai generasi penerus bangsa, mempunyai peran yang strategis. Oleh karena itu sekolah harus berupaya untuk menghadapi dan mengantisipasi tantangan dengan pemikiran dan daya nalar yang berkualitas. Hal ini dilakukan dalam upaya peningkatan pengembangan sikap nasionalisme di kalangan pelajar.

Secara makro pendidikan nasional bertujuan membentuk organisasi pendidikan yang bersifat otonom, sehingga mampu melakukan inovasi dalam pendidikan untuk menuju suatu lembaga yang beretika, selalu menggunakan nalar, berkemampuan komunikasi sosial yang positif dan memiliki sumber daya manusia yang sehat dan tangguh.

Secara mikro pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika (beradab dan berwawasan budaya bangsa Indonesia), memiliki nalar (maju, cakap, cerdas, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab), berkemampuan komunikasi sosial (tertib dan sadar hukum, kooperatif dan kompetitif, demokratis), dan berbadan sehat sehingga menjadi manusia mandiri.

Sebagian besar aspek tujuan pendidikan nasional tersebut di atas banyak yang menjadi aspek tujuan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (Pendidikan IPS), karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berkenaan dengan ideologi, politik, kewarganegaraan, serta prospek kualitas manusia / generasi mendatang.

Dengan demikian PPKn merupakan mata pelajaran yang termasuk dalam kelompok Pendidikan IPS dalam kurikulum sekolah merupakan salah satu dimensi substansi pendidikan nasional yang amat penting, namun belum sepenuhnya

memberikan dampak pembelajaran dan dampak pengiring yang dapat diandalkan untuk menanamkan tujuan yang diharapkan. Pendidikan IPS sering dianggap membosankan dan lunak (*soft*), dianggap sebagai pelajaran hafalan, dan dianggap sebagai pendidikan kedua setelah IPA.

Dalam kaitannya dengan tuntutan akan demokratisasi pada era reformasi saat ini, kelemahan utama yang dirasakan dalam sistem pendidikan di Indonesia ialah *pelaksanaan proses pembelajaran yang kurang mendorong terjadinya pengembangan siswa yang dinamis dan budaya berpikir kritis*. Oleh karena itu dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2000 Bab XI tentang Program Pendidikan Nasional dicantumkan bahwa tantangan yang dihadapi dunia pendidikan yakni budaya berpikir kritis yang masih rendah.

Hal tersebut dapat dimengerti, karena masalah umum yang dihadapi oleh sebagian besar guru PPKn (Pendidikan IPS) di sekolah adalah kurangnya kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan model pembelajaran yang non-konvensional yang dapat membangkitkan gairah belajar, mengembangkan seluruh potensi anak didik, menanamkan kehidupan yang demokratis, dan menjadikan masyarakat dan lingkungan sebagai sumber belajar. Kondisi riil sampai saat ini adalah sebagian besar anak didik belajar dari guru dan buku teks, bersifat "*Watering down*", monolog, dan bersifat rutinitas belaka, kurang variasi, dan miskin improvisasi.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi, guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menyiapkan dan merancang model pembelajaran yang akan dilakukannya. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan nasional secara umum dan tujuan PPKn (Pendidikan IPS) pada khususnya, yang pada prinsipnya bertujuan mendidik dan membimbing siswa menjadi warga negara yang baik.



yang bertanggung jawab baik secara pribadi, sosial /masyarakat , bangsa dan negara bahkan sebagai warga dunia.

Pemahaman tentang guru sentris (*teacher centered*) yang selama ini berkembang harus dirubah menjadi siswa sentris, artinya pengajaran hendaknya berpusat pada siswa (*student centered=student based*). Dalam pengertian ini maka guru harus mampu membaca / memahami hal ikhwal keadaan diri siswa serta selalu memperhatikan keadaan, kesukaran, keberhasilan, dan kemampuan/ potensi siswa. Oleh karena itu diperlukan pengajaran melalui aneka metoda/ tehnik yang memang memberikan kesempatan pada siswa untuk maju/ berkembang menurut potensinya masing-masing.

Pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi masing-masing siswa tersebut, antara lain melalui pendekatan S-T-M. Yang menjadi dasar apa yang dilakukan oleh Program S-T-M adalah *menghasilkan warga negara yang memiliki pengetahuan yang cukup sehingga mampu membuat keputusan-keputusan yang krusial tentang masalah-masalah dan isu-isu yang mutakhir dan mengambil tindakan sesuai dengan keputusan yang dibuatnya tersebut.*

Pendekatan S-T-M, merupakan suatu pendekatan yang dapat dimanfaatkan guru untuk meningkatkan kreatifitas, pemahaman konsep dan pengembangan loyalitas nasionalisme dalam pembelajaran PPKn. PPKn merupakan suatu mata pelajaran yang mempunyai tujuan akhir membentuk warga negara yang baik (*good Citizenship*) yang mengerti dan memahami akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan selanjutnya dapat menerapkan / mengamalkan apa yang sudah dipahaminya dalam bentuk partisipasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kaitannya dengan S-T-M, bahwa PPKn sangat

relevan dengan menggunakan pendekatan S-T-M dalam upaya peningkatan kreatifitas, pemahaman konsep dan pengembangan sikap loyalitas nasionalisme, karena yang dituntut dalam pelajaran ini bukan hanya konsep yang dipelajari di dalam kelas tetapi diperlukan adanya pengembangan dari konsep yang telah diperoleh siswa dengan menghubungkan konsep tersebut dalam kehidupan nyata yaitu masyarakat lingkungannya dalam berbagai aspek/ bidang kehidupan termasuk teknologi.

## 2. Hipotesis

Hipotesis penelitian yang akan diuji kebenarannya melalui kegiatan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

- (1) Sikap siswa IPA terhadap pendekatan S-T-M dalam proses pembelajaran PPKn lebih positif dibandingkan dengan sikap siswa IPS.
- (2) Kreatifitas siswa IPA dalam menyelesaikan tugas baik di kelas maupun di luar kelas dalam proses pembelajaran PPKn dengan pendekatan S-T-M lebih tinggi dibandingkan dengan siswa kelompok IPS.
- (3) Penguasaan konsep Siswa IPA setelah mempelajari pokok bahasan Kesetiaan melalui pendekatan S-T-M, lebih tinggi dibandingkan dengan siswa IPS.
- (4) Sikap loyalitas nasionalisme Siswa IPA setelah mempelajari pokok bahasan “Kesetiaan” dengan pendekatan S-T-M lebih tinggi dibandingkan dengan siswa IPS.
- (5) Terdapat hubungan positif antara penguasaan konsep dan sikap loyalitas terhadap nasionalisme. Semakin tinggi penguasaan konsep nasionalisme akan semakin baik pula sikap loyalitasnya terhadap nasionalisme tersebut.

## F. METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah eksperimental semu (*quasi experimental*), karena dalam penelitian ini tidak menggunakan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen diarahkan secara apa adanya sesuai dengan proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Dilakukan pada lingkungan natural/ alamiah, dengan memberikan suatu perlakuan (stimulan), dan objek observasi adalah fenomena-fenomena yang dibiarkan terjadi secara alamiah; sehingga subjek penelitian dapat bebas bereaksi secara alamiah akan tetapi tetap dalam batas-batas fenomena yang dikehendaki oleh peneliti.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif, karena dalam penelitian ini menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metoda statistika dalam rangka pengujian hipotesis, dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Pendekatan kualitatif digunakan untuk membantu menjelaskan faktor-faktor yang mendasari, mendukung dan memperkuat kesimpulan.

Penelitian ini direncanakan dalam tahap-tahap sebagai berikut :

- 1.1. Tahap pertama, dilakukan pemilihan kelas yang dijadikan sampel (eksperimen), dipilih secara acak baik kelas IPA maupun IPS.
- 1.2. Tahap kedua, dilakukan uji coba validitas dan reliabilitas soal *pre-test* dan *post-test* dengan pemberian sejumlah soal konsep/ kognitif dan skala sikap pada kelas bukan eksperimen.
- 1.3. Tahap ketiga, dilakukan pemberian tes awal (*pre-test*) pada kelas eksperimen untuk mengetahui pemahaman konsep dan pengembangan sikap siswa.

1.4. Tahap keempat, meliputi :

1.4.1. Pemberian perlakuan eksperimen menggunakan pendekatan S-T-M pada kelas eksperimen.

1.4.2. Pengamatan proses pembelajaran oleh observer.

1.5. Tahap kelima, pemberian tes akhir (*post-test*) untuk mengetahui pemahaman konsep dan pengembangan sikap siswa, setelah proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan S-T-M

1.6. Tahap keenam, mengadakan wawancara kepada observer dan siswa kelas eksperimen berkenaan dengan proses pembelajaran PPKn dengan pendekatan S-T-M.

1.7. Tahap ketujuh, diberikan kuesioner pada kelas eksperimen.

1.8. Tahap kedelapan, mengolah data yang diperoleh antara lain :

1.8.1. Menganalisis hasil observasi

1.8.2. Menganalisis hasil tes awal dan tes akhir

1.8.3. Menganalisis hasil wawancara dengan observer maupun siswa.

1.8.4. Menganalisis hasil kuesioner

1.9. Tahap kesembilan, pengambilan kesimpulan

**2. Teknik dan Alat Pengumpul Data**

Penelitian ini menggunakan lima cara pengumpulan data, yaitu :

- a. Observasi
- b. Tes kognitif konsep dan tes skala sikap
- c. Wawancara
- d. Kuesioner.



Tes dilakukan untuk memperoleh data mengenai hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran PPKn dengan pokok bahasan “Kesetiaan”. Tes meliputi ranah pengetahuan/ konsep dan ranah sikap. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang proses dan sikap siswa terhadap pembelajaran PPKn dengan pendekatan S-T-M. Wawancara dilakukan untuk melihat lebih jauh gambaran proses dan sikap siswa terhadap Pendekatan S-T-M. Sedangkan kuesioner diajukan untuk mengetahui pendapat siswa terhadap pembelajaran PPKn dengan pokok bahasan “Kesetiaan” melalui Pendekatan S-T-M.

### 3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data penelitian yang meliputi hasil tes awal dan tes akhir dianalisis dengan membandingkan perbedaan tes awal dan tes akhir pada masing-masing kelas. Data observasi, wawancara, dan kuesioner, dianalisis untuk membantu memperjelas dan memperkuat kesimpulan. Keseluruhan analisa diuji signifikannya dalam rangka menentukan apakah hasil itu cukup signifikan untuk menolak atau menerima hipotesis.

### G. LOKASI, POPULASI, DAN SAMPEL PENELITIAN

Lokasi Penelitian adalah di SMU Negeri 8 Bandung, dipilihnya SMU tersebut berdasarkan alasan berikut :

1. Tempat peneliti bertugas
2. Peneliti lebih memahami hasil belajar dan sikap siswa secara menyeluruh
3. Efisiensi waktu dan biaya penelitian

Populasi penelitian adalah siswa SMU Negeri 8 Bandung yang sedang melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan S-T-M. Sampel penelitian diambil secara "purposive", yaitu kelas III IPA 5 dan kelas III IPS 3. Hal ini dilakukan agar memperjelas gambaran konkrit tentang pelaksanaan pendekatan S-T-M pada karakteristik kelas yang berbeda, yaitu IPA dan IPS. Adapun ukuran sampel penelitian adalah 47 orang untuk kelas III IPA5 dan 47 orang untuk kelas III IPS3. Waktu penelitian lapangan dilakukan pada bulan Maret – April tahun 2003.

## H. POSISI STUDI

Pendidikan Ilmu Sosial (PIPS) merupakan suatu *synthetic disciplines*, yang berusaha mengorganisasikan dan mengembangkan substansi ilmu-ilmu sosial secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan (NCSS) dalam Soemantri, Numan M, 2001:199. Lebih lanjut Soemantri menyatakan bahwa :

PIPS adalah suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, ideologi negara dan disiplin ilmu lainnya serta masalah-masalah sosial terkait, yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. (Soemantri, Numan M, 2001:74)

Pendidikan ilmu sosial untuk pengajaran di sekolah biasanya terdiri dari sejarah, geografi dan kewarganegaraan untuk Sekolah Dasar/ SD, untuk SLTP terdiri dari sejarah, ekonomi, geografi dan kewarganegaraan, sedangkan untuk SMU terdiri dari sejarah, ekonomi, geografi, kewarganegaraan, sosiologi dan antropologi. PIPS harus mampu mensintesis konsep-konsep yang relevan antara ilmu-ilmu sosial tersebut, dan perlu memasukkan unsur-unsur pendidikan, psikologi, pembangunan dan masalah-masalah sosial yang aktual dalam kehidupan masyarakat. Bahkan

dewasa ini PIPS perlu memasukkan bahan/ materi yang bukan hanya berkenaan dengan kehidupan masyarakat, melainkan juga berkenaan dengan dampak sains dan teknologi terhadap kehidupan tatanan masyarakat setempat, nasional dan internasional. Oleh karena itu, masalah perdamaian dunia, peperangan, kemiskinan, demontrasi dan lain-lain hendaknya menjadi perhatian PIPS.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan suatu mata pelajaran yang termasuk dalam pendidikan IPS, mempunyai tujuan akhir membentuk warga negara yang baik (*good Citizenship*) yang mengerti dan memahami akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dan selanjutnya dapat menerapkan/ mengamalkan apa yang sudah dipahaminya dalam bentuk partisipasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam partisipasinya tersebut harus tetap mempertahankan kebanggaan menjadi bangsa Indonesia, mempertahankan identitas nasional, mengembangkan rasa nasionalisme, mempertahankan keberlanjutan tradisi budaya yang bermanfaat dan mengembangkan kesadaran, semangat, dan kesatuan nasional.

Dalam sejarah perkembangannya, pelajaran PPKn sering menimbulkan gejala, karena sifat substansinya sangat erat kaitannya dengan kondisi kehidupan dan kebijakan politik saat itu. Substansi PPKn sebagian besar berisikan serangkaian konsep yang secara konstitusional sudah resmi menjadi moral bangsa, maka guru untuk mempermudah proses pembelajarannya menggunakan metode yang mengandalkan "wibawa" guru (*method of authority*) dan ceramah. Selanjutnya guru menuntut agar pelajaran dan buku wajib dikuasai siswa, sehingga siswa cenderung menghafal. Hal ini mengakibatkan pelajaran PPKn menjadi abstrak.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/ PPKn, ( disebut mata pelajaran Kewarganegaraan dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi, 2001, dan berlabel Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003), senantiasa tanggap dan membenahi diri agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan (sains) dan teknologi. Dengan kata lain dalam mengantisipasi kemajuan sains dan teknologi perlu dilakukan berbagai pembaharuan dan perbaikan dalam Pendidikan IPS umumnya dan PPKn pada khususnya.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam mengantisipasi kemajuan sains dan teknologi beserta dampaknya yang berkaitan dengan pendidikan, dalam hal ini PPKn adalah dengan menerapkan program/ pendekatan Sains-Teknologi-Masyarakat (S-T-M) dalam proses pembelajarannya. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan antara kemajuan sains dan teknologi, membanjirnya informasi ilmiah dalam dunia pendidikan, masuknya budaya asing, dan informasi lainnya yang ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, yang dimungkinkan dapat mengikis nasionalisme.

Ditawarkannya pendekatan S-T-M dimaksudkan agar PPKn lebih realistik dalam menghadapi kenyataan sosial, sehingga materinya lebih berguna bagi siswa terutama mereka yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Materi pendidikan yang lebih realistik ini selain untuk mencegah verbalisme, juga dimaksudkan untuk mengembangkan berpikir integrative (*integrative thinking*) dalam proses pengambilan keputusan dan ketrampilan pemecahan masalah yang sangat diperlukan bagi setiap warganegara. Selain itu juga merupakan salah satu sasaran tujuan institusional pendidikan dasar dan menengah.



Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat relevan dengan menggunakan pendekatan S-T-M, karena yang dituntut dalam pelajaran ini bukan hanya konsep yang dipelajari di dalam kelas tetapi diperlukan adanya pengembangan dari konsep yang telah diperoleh siswa dengan menghubungkan konsep tersebut dalam kehidupan nyata yaitu masyarakat lingkungannya dalam berbagai aspek/ bidang kehidupan termasuk teknologi. Dalam PPKn (IPS), *Masyarakat adalah sebagai laboratoriumnya.*

Pendekatan S-T-M yang didasari paham konstruktivisme, berarti bahwa terdapat kaitan antara keadaan nyata di luar kelas dan manfaat konsep yang akan dikembangkan, maka siswa lebih mudah mengkonstruksi pengetahuan atau konsep tersebut. Disamping itu dengan mengetahui manfaat konsep-konsep tertentu, siswa juga akan termotivasi untuk belajar, bahkan tidak segan-segan mencari informasi dari sumber-sumber lain yang dimungkinkan menggunakan produk teknologi. Dengan demikian pendekatan S-T-M dapat digunakan sebagai strategi alternatif yang dapat diterapkan guru dalam melaksanakan interaksi belajar mengajar *pada topik yang sesuai dengan menggunakan berbagai macam metode.*

Pendekatan S-T-M bila dikaji secara mendalam sebenarnya sangat representatif sebagai salah satu tujuan PPKn itu sendiri, yaitu mempersiapkan individu-individu menjadi anggota masyarakat yang dapat berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain mempersiapkan individu-individu yang mampu menerapkan pengetahuan ilmiah dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam upaya mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik, termasuk dalam hal ini pengembangan sikap loyalitas nasionalisme.

Untuk merealisasikan tujuan ini, seyogyanya setiap guru memiliki wawasan dan persepsi yang jelas tentang hakikat, makna dan tujuan sains ( PPKn / Kewarganegaraan/ Pendidikan Kewarganegaraan) serta memahami pendekatan dan strategi yang bervariasi serta mampu menerapkannya dalam melaksanakan tugasnya yaitu mendidik, membimbing, dan membina para siswa.

Penguasaan berbagai pendekatan dalam pembelajaran merupakan hal yang sangat penting, baik bagi para penyusun kurikulum, penyusun buku, maupun para pengajar. Joyce (1980) dalam Alit (1994) mempercayainya bahwa "Kekuatan suatu pendidikan terletak pada kemampuan memanfaatkan berbagai pendekatan, kemudian memadukannya kepada tipe dan karakteristik siswa." *Kompetensi guru* dalam hal pendekatan suatu pembelajaran mempunyai implikasi kepada kemampuan guru membuat lingkungan yang beragam. *Kompetensi bagi para penyusun kurikulum* terhadap berbagai pendekatan diperlukan untuk mendesain sumber belajar dan memungkinkan pengembangan alternatif kependidikan. *Kompetensi penyusun bahan pelajaran* terhadap berbagai pendekatan dibutuhkan untuk menciptakan bahan pelajaran (buku, slide, film) lebih menarik dan lebih efektif.

Matrik penelitian dapat dilihat pada lampiran 1.2.